

**Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Kejuruan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan  
(Studi Kasus Pasal 27C Di SMK Utama Bakti Palembang)**

**Oleh :**

**Nama : Widya Puspita**

**NIM : 21.11.094**

**Program Studi : Administrasi Publik**

---

***ABSTRACT***

*Widya Puspita, 2025, Implementation of the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia Number 12 of 2024 concerning the Curriculum in Early Childhood Education, Elementary Education, and Vocational Secondary Education at the South Sumatra Provincial Education Office (Case Study of Article 27C at SMK Utama Bakti Palembang). Department of Public Administration at the School of Public Administration (STIA) Satya Negara Palembang. Main Supervisor (I) Mr. H. Suparman, S.Sos, S.Pd.I, M.Si and Second Supervisor (II) Mr. Ir. H. Heru Adi Putranto, M.Si.*

*Implementation is an action and step taken by a public policy actor based on a formulated plan. This study aims to determine the implementation of the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia Number 12 of 2024 concerning the Curriculum in Early Childhood Education, Elementary Education, and Vocational Secondary Education at the South Sumatra Provincial Education Office (Case Study of Article 27C at SMK Utama Bakti Palembang) and to identify the supporting and inhibiting factors in the implementation of Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia Number 12 of 2024 at SMK Utama Bakti Palembang.*

*The method used was qualitative descriptive, with four main informants. Data were obtained from primary and secondary sources through observation, interviews, literature review, and documentation. Data analysis included reduction, presentation, and verification of conclusions.*

*The research findings indicate that the implementation of policies at the South Sumatra Provincial Education Office, particularly at SMK Utama Bakti, is proceeding fairly well based on four indicators: (1) communication, (2) resources, (3) disposition, and (4) bureaucratic structure. This is reflected in the socialization efforts conducted by the school principal, the support of competent educators, and the implementation in accordance with established standard operating procedures (SOPs). Supporting factors include good coordination and the availability of human resources, while obstacles include limited facilities and adaptation to the new curriculum. Reflection and evaluation in accordance with Article 27C indicate improvements in the learning process that support the implementation of the Merdeka Curriculum at the school.*

***Keywords: Implementation and Merdeka Curriculum***

## ABSTRAK

**Widya Puspita, 2025, Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar Dan Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Pasal 27C Di SMK Utama Bakti Palembang).** Jurusan Administrasi Publik pada sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik (STIA) Satya Negara Palembang. Pembimbing Utama (I) Bapak H. Suparman, S.Sos, S.Pd.I, M.Si dan Pembimbing (II) Bapak Ir. H. Heru Adi Putranto, M.Si.

Implementasi merupakan suatu tindakan serta langkah seorang aktor kebijakan publik berdasarkan formulasi yang telah dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar Dan Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan Pada Dinas Pendidikan Sumatera Selatan (Studi Kasus Pasal 27C Di SMK Utama Bakti Palembang) dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Di SMK Utama Bakti Palembang.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan empat informan utama. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi, penyajian, dan verifikasi kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di SMK Utama Bakti, berjalan cukup baik berdasarkan empat indikator: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Hal ini tercermin dari sosialisasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, dukungan tenaga pendidik yang kompeten, serta pelaksanaan sesuai SOP yang ditetapkan. Faktor pendukung meliputi koordinasi yang baik dan ketersediaan sumber daya manusia, sedangkan hambatannya antara lain keterbatasan fasilitas dan adaptasi terhadap kurikulum baru. Refleksi dan evaluasi sesuai Pasal 27C menunjukkan adanya perbaikan proses pembelajaran yang mendukung penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah tersebut.

**Kata Kunci: Implementasi dan Kurikulum Merdeka**

## PENDAHULUAN

Implementasi merupakan upaya untuk mewujudkan suatu ide, kebijakan, atau program yang telah dirancang secara terencana ke dalam tindakan nyata. Dalam konteks pendidikan, implementasi kebijakan menjadi faktor kunci untuk memastikan keberhasilan program, termasuk perubahan kurikulum. Menurut Indrajit (2016), sistem pendidikan di Indonesia senantiasa mengalami perkembangan guna menjawab tuntutan zaman. Salah satu perubahan signifikan adalah peralihan dari Kurikulum 2013 (K13) menuju Kurikulum Merdeka (Sari, Sunendar, & Anshori, 2023). Pergantian ini bertujuan memodernisasi pendidikan dengan memberikan keleluasaan lebih besar kepada sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan lokal (Angga dkk., 2022).

Meskipun demikian, implementasi Kurikulum Merdeka tidak terlepas dari berbagai tantangan. Hambatan yang muncul antara lain kesiapan guru, keterbatasan sarana-prasarana, serta kesenjangan kemampuan peserta didik dalam beradaptasi dengan pendekatan pembelajaran yang lebih mandiri (Mabsutsah & Yushardi, 2022; Azkiah & Hamami, 2021). Di sisi lain, penerapan kurikulum ini menuntut adanya refleksi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024. Refleksi diperlukan untuk meninjau efektivitas pelaksanaan, evaluasi berfungsi mengukur capaian, sedangkan perbaikan diarahkan untuk menyelesaikan kendala dan meningkatkan mutu pembelajaran (Ningrum, 2023).

Dalam studi kasus di SMK Utama Bakti Palembang (Pasal 27C), ditemukan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka masih menghadapi kendala teknis. Guru cenderung fokus pada penjelasan materi secara monoton sehingga menimbulkan kejenuhan peserta didik. Di sisi lain, keterbatasan pelatihan, kesiapan administrasi, dan kurangnya inovasi pembelajaran juga menjadi hambatan implementasi. Namun, terdapat upaya untuk memanfaatkan media digital dan penyusunan modul pembelajaran yang lebih sederhana sebagai bentuk adaptasi terhadap kurikulum baru.

Secara umum, implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Utama Bakti Palembang telah menunjukkan kemajuan dengan adanya upaya refleksi, evaluasi, dan penyesuaian terhadap kebutuhan pembelajaran. Namun, masih diperlukan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan fasilitas yang memadai, serta kolaborasi antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka dapat benar-benar menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang adaptif, relevan, dan berorientasi pada masa depan.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

“Bagaimanakah Implementasi “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar Dan Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan” Pada Dinas Pendidikan (Studi Kasus Pasal 27C SMK UTAMA BAKTI PALEMBANG)”

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pendidikan Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar Dan Jenjang Pendidikan Menengah Atas Pada Diknas Pendidikan.

### Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut.

### **A. Bagi Penulis**

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh wawasan dan informasi langsung mengenai Kurikulum Merdeka Belajar, yang dapat menjadi bekal berharga dalam menghadapi dunia kerja.

### **B. Bagi Sekolah**

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi pihak sekolah untuk mengetahui tingkat pengetahuan terkait Kurikulum Merdeka Belajar. Temuan ini diharapkan mendorong peningkatan kegiatan penyuluhan mengenai Kurikulum Merdeka Belajar serta memberikan panduan dalam pengimplementasian yang benar, terarah, dan terstruktur.

### **C. Bagi Guru**

Penelitian ini dapat membantu guru memahami konsep Kurikulum Merdeka Belajar secara lebih mendalam, sehingga mampu menerapkan pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

### **D. Bagi Siswa**

Siswa terlatih kesiapannya dalam proses pembelajaran dengan kurikulum baru yang diterapkan pemerintah sehingga siswa serius untuk melakukan pembelajaran yang dilakukannya

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Menurut Budi Winarno ( 2012 : 55 ) implementasi merupakan “kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan keputusan kebijaksanaan sebelumnya.”

Implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan dibuat. Jika suatu kebijakan tidak dilaksanakan, maka kebijakan tersebut tidak akan memiliki dampak yang nyata. Menurut Hill dan Hupe (dalam Handoyo, 2012:93) implementasi berhubungan dengan “kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat.” Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014:148), implementasi kebijakan adalah “apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau jenis keluaran yang nyata.” Menurut Van Horn dan Van Meter dalam Mulyadi (2018:45) menyatakan bahwa implementasi tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan.

### **Model-Model Implementasi Kebijakan**

Model implementasi membantu kita melihat gambaran keseluruhan dari sesuatu, seperti objek, situasi, atau proses. Model tersebut menunjukkan bagian-bagian yang terlibat dan bagaimana bagian-bagian tersebut saling terhubung. Komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik, terdiri atas

1. program (kebijakan) yang dilaksanakan
2. *Target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan
3. unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut dan
4. faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik). Model implementasi kebijakan publik itu tidak hanya ada berbagai macam sesuai dengan kerangka berfikir pembuat model

tersebut. Dalam uraian berikut ini tidak akan dibahas semua macam model, tetapi beberapa saja yang dianggap cukup penting untuk diperkenalkan.

### Model George C. Edward III

George C. Edward dalam Mulyadi (2018:68-69) mengemukakan beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

#### 1. Komunikasi

Para implementor perlu memahami apa yang perlu mereka lakukan untuk memastikan kebijakan berjalan dengan baik. Untuk mencegah masalah saat melaksanakan kebijakan, penting untuk menjelaskan dengan jelas tujuan dan apa yang perlu dicapai kepada orang-orang yang terdampak.

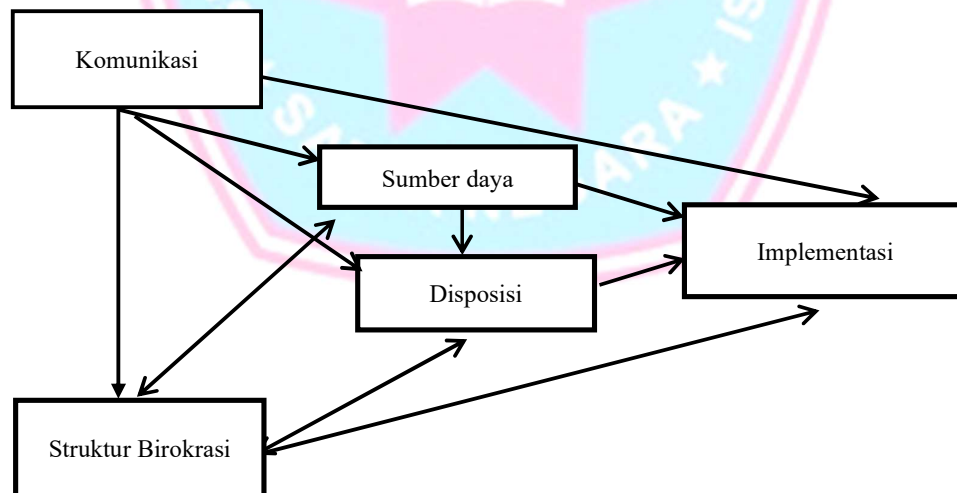
#### 2. Sumber daya

Meskipun isi kebijakan dijelaskan dengan jelas dan konsisten, jika orang-orang yang melaksanakannya tidak memiliki sumber daya yang tepat, kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, seperti keterampilan dan pengetahuan mereka yang melaksanakannya, serta sumber daya keuangan. Sumber daya sangat penting untuk membuat kebijakan berjalan secara efektif.

#### 3. Disposisi

Disposisi merupakan karakter dan sifat yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, jujur, dan demokratis. Jika implementor memiliki disposisi yang baik, mereka dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan, sehingga proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

**Gambar 1**  
**Model Implementasi George Edward III**



*Sumber: Edward III, (1980:48) dalam Indiahono (2009:33)*

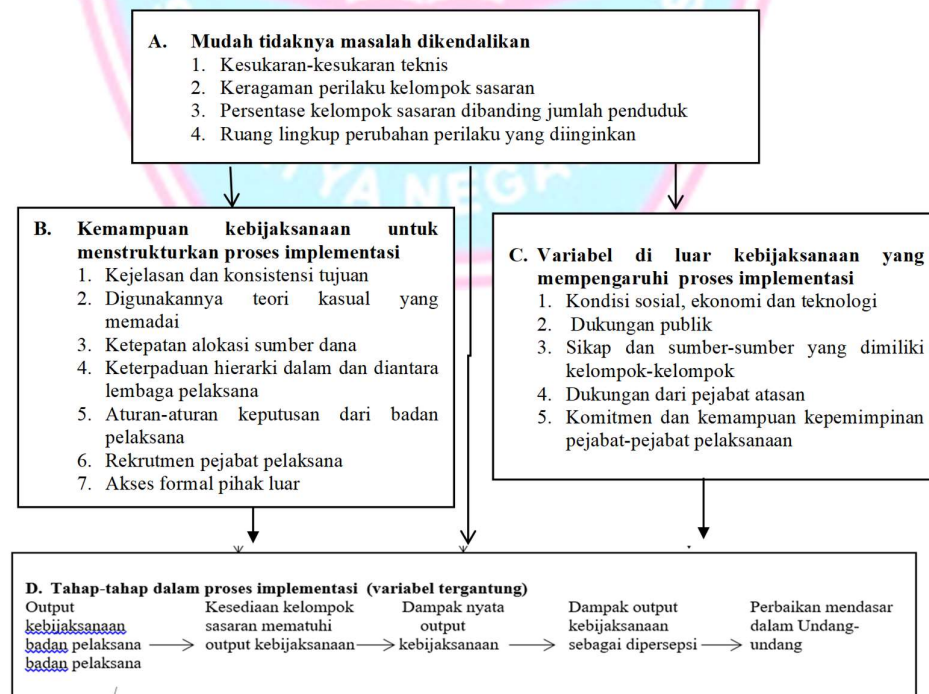
### Model Implementasi Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Mazmanian dan Sabatier dalam Mulyadi, (2015:70-71) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni;

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*):
  - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
  - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
  - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.
  - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*).
  - a. Kejelasan isi kebijakan ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata.
  - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
  - c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut.
  - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksanaan.
  - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
  - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
  - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3. Variabel lingkungan (*nonstartutory variables affecting implementation*):
  - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
  - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.
  - c. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*).
  - d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementasi.

Gambar 2

#### Model Implementasi Menurut daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier



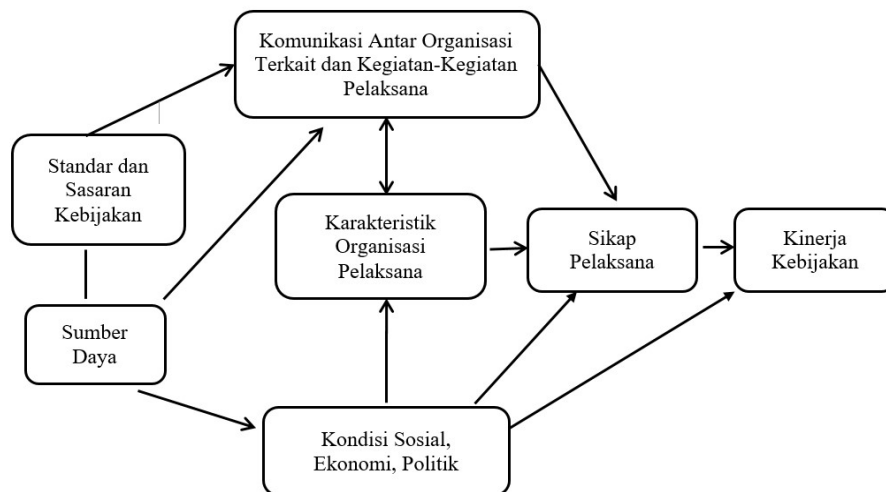
### Model Van Meter Dan Van Hoom

Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2018:72-73) menjelaskan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a) Standar dan sasaran kebijakan  
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.
- b) Sumber daya  
Kebijakan perlu didukung oleh sumberdaya, baik itu sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia.
- c) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas  
Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
- d) Karakteristik agen pelaksana  
Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk di dalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- e) Kondisi sosial, ekonomi dan politik  
Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- f) Disposisi implementor  
Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu:
  - a. Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
  - b. Kongnisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.
  - c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki implementor.

Gambar 3

#### Model Implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn



### Impelementasi Kurikulum Merdeka

Implementasi kurikulum merdeka *the paxford advance learning's dictionary* menyatakan bahwa implementasi adalah "To implement something intolerable", (pelaksanaan suatu sebagai tata cara penerapan yang mempunyai akibat), hal ini melibatkan penerapan ide, metode, atau cara baru ke dalam situasi nyata, yang mengubah apa yang orang ketahui, dapat lakukan, percayai, dan cara mereka bertindak. Fokusnya adalah pada tindakan atau sistem yang membuat hal ini terjadi.

Pemerintah memberikan kesempatan kepada guru dan sekolah untuk mencoba kurikulum mereka sendiri berdasarkan apa yang paling sesuai dengan kebutuhan sekolah atau unit pendidikan mereka. Untuk tahun ajaran 2022/2023, sekolah memiliki tiga opsi untuk menggunakan kurikulum merdeka antara lain sebagai berikut.

1. terapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka tanpa menghilangkan sama sekali yang lama.
2. penerapan kurikulum merdeka dengan bahan ajar yang sudah jadi.
3. penerapan kurikulum merdeka dengan pengembangan mandiri berbagai bahan ajar.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa penerapan kurikulum merdeka merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang matang dan rinci, dan penerapan kurikulum merdeka ini bersifat fleksibel. Kurikulum yang dibuat dapat dikembangkan hingga tercapai pembelajaran yang lebih efektif, asalkan mengikuti kaidah dan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Pendidikan yang dilaksanakan mempunyai tujuan mulia yaitu mencerdaskan kehidupan masyarakat. Banyak sekali faktor pendukung keberhasilan bidang pendidikan. Suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terencana berdasarkan pedoman dan alasan untuk mencapai tujuan kegiatan pembelajaran.

### **Kurikulum Merdeka**

Kurikulum Merdeka adalah rencana pembelajaran yang mencakup berbagai aktivitas di dalam kelas. Materi pembelajaran disusun sedemikian rupa agar siswa memiliki waktu untuk memahami konsep dan mengembangkan keterampilan mereka. Guru dapat memilih metode pengajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing siswa. Ada proyek khusus yang dirancang untuk membantu siswa mengembangkan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila.

Kurikulum Merdeka adalah pilihan opsional yang dapat digunakan oleh sekolah mulai tahun ajaran 2022/2023. Kurikulum ini mengikuti arah kurikulum sebelumnya (Kurtilas). Sebelum kurikulum nasional direvisi pada tahun 2024, pemerintah akan menyediakan pilihan kurikulum yang berbeda bagi sekolah untuk digunakan. Kurikulum ini baru-baru ini diperkenalkan oleh Nadiem Makarim, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Ide utama Kurikulum Merdeka adalah menempatkan siswa sebagai prioritas utama, dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar, minat, dan bakat mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu siswa mengejar ketertinggalan belajar yang terjadi akibat pandemi COVID-19.

Seperti apa yang dituliskan di SK Kemendikbud Ristek, satuan lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah di seluruh Indonesia diperbolehkan untuk menerapkan kurikulum sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah. Terdapat tiga opsi kurikulum yang diperbolehkan untuk diimplementasikan di sekolah, ketiganya adalah Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, serta Kurikulum Merdeka.

### **Kurikulum dalam Pendidikan**

Kurikulum menurut “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional” adalah “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran”. Menurut Wulandari, (2020:12) Perubahan kurikulum bertujuan untuk “menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman, seperti penguatan pendidikan karakter dan integrasi teknologi dalam pembelajaran.” Selain itu, kurikulum menjadi alat untuk menciptakan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari.

### **Refleksi, Evaluasi, dan Perbaikan Implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan**

Salah satu amanat dari “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Pasal 27 huruf c” adalah bahwa satuan pendidikan wajib “melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.” Ketentuan ini menegaskan pentingnya proses tindak lanjut

secara sistematis terhadap pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah. Secara konseptual, kegiatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Refleksi merupakan proses meninjau ulang praktik pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran di satuan pendidikan. Refleksi dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta hambatan yang muncul selama pelaksanaan. Kegiatan ini bersifat introspektif dan partisipatif, melibatkan pendidik sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran.

Evaluasi adalah upaya sistematis untuk menilai sejauh mana kurikulum telah diimplementasikan secara efektif dan efisien. Evaluasi mencakup analisis terhadap strategi pembelajaran, ketercapaian tujuan, kualitas asesmen, kesiapan guru, serta dampaknya terhadap hasil belajar peserta didik.

Perbaikan merupakan tindakan yang diambil berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi. Perbaikan dilakukan untuk menyempurnakan proses pembelajaran dan pengelolaan kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman. Perbaikan bisa berupa penyusunan ulang rencana pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, ataupun perbaikan sarana prasarana pendukung.

Refleksi, evaluasi, dan perbaikan membentuk suatu siklus berkelanjutan dalam manajemen mutu pendidikan. Ketiga komponen ini sangat penting untuk memastikan bahwa Kurikulum Merdeka tidak hanya dilaksanakan secara administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik.

### **Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 12 Tahun 2024 Pasal 27C**

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Pasal 27C berisi tentang:

C. Melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

### **Tantangan Implementasi Kebijakan Kurikulum**

Berdasarkan penelitian yang relevan, tantangan utama dalam implementasi kebijakan kurikulum mencakup:

- a. Kurangnya Pemahaman Guru: Banyak pendidik yang belum sepenuhnya memahami perubahan yang diatur dalam kurikulum terbaru. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan intensif yang diberikan kepada para guru (Ahmad, 2021:45). Pemahaman yang kurang menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana pembelajaran dan implementasinya di lapangan.
- b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Infrastruktur teknologi masih menjadi hambatan utama, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas. Menurut Rahmawati (2022 : 67), sekolah-sekolah di daerah cenderung menghadapi kendala dalam pengadaan perangkat digital yang mendukung pembelajaran.
- c. Resistensi terhadap Perubahan: Sebagian pendidik dan tenaga kependidikan cenderung merasa nyaman dengan metode lama sehingga sulit beradaptasi dengan kebijakan baru. Suhendra (2023:89) menyebutkan bahwa resistensi ini dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan kurikulum baru.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena membantu peneliti memahami situasi secara lebih mendalam, terutama ketika menghadapi isu-isu sosial, budaya, dan kebijakan yang kompleks. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 12 Tahun 2024 diterapkan di SMK Utama Bakti Palembang dalam konteks nyata.

Metode studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu kasus spesifik, yakni implementasi kebijakan kurikulum berbasis kompetensi di SMK Utama Bakti Palembang. Studi kasus

memberikan fleksibilitas untuk menggali aspek-aspek spesifik dan mendalam terkait konteks kebijakan, praktik pelaksanaan, hambatan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap berbagai pihak.

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

### 1. Tahap Persiapan:

- a. Studi Literatur: Peneliti membaca berbagai literatur terkait kebijakan pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi, dan pendekatan implementasi kebijakan.
- b. Identifikasi Masalah: Peneliti merumuskan masalah penelitian berdasarkan fenomena yang diamati di SMK Utama Bakti Palembang.
- c. Penyusunan Instrumen: Peneliti menyusun pedoman wawancara, lembar observasi, dan format pengumpulan dokumen yang relevan.

### 2. Tahap Pengumpulan Data:

- a. Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan kepala sekolah, guru, siswa, dan staf administrasi untuk mendapatkan informasi kualitatif tentang pelaksanaan kebijakan.
  - b. Observasi Langsung: Peneliti mengamati proses pembelajaran di kelas, interaksi antara guru dan siswa, serta penggunaan fasilitas pendidikan yang mendukung pelaksanaan kebijakan.
  - c. Analisis Dokumen: Peneliti menganalisis dokumen resmi seperti silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), laporan sekolah, dan regulasi terkait.
3. Tahap Analisis Data: Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen dianalisis secara bertahap menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
  4. Tahap Pelaporan: Peneliti menyusun laporan penelitian yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi berdasarkan data yang telah dianalisis.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menerapkan strategi triangulasi untuk memastikan validitas data. Triangulasi dilakukan dengan:

1. Membandingkan data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dokumen).
2. Melibatkan berbagai perspektif informan untuk menghindari bias.
3. Diskusi dengan ahli pendidikan untuk mendapatkan masukan dan validasi atas temuan penelitian.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk:

1. Menggali informasi secara holistik mengenai proses implementasi kebijakan.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan pelaksanaan kurikulum.
3. Memberikan rekomendasi yang dapat membantu sekolah dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan di masa depan.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika pelaksanaan kebijakan kurikulum berbasis kompetensi di SMK Utama Bakti Palembang serta memberikan kontribusi pada pengembangan teori implementasi kebijakan dalam konteks pendidikan Indonesia.

### Definisi Operasional

Berisikan indikator dari suatu variabel yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data secara relevan untuk variabel tersebut (Singarimbuandan Effendi 2011 : 146). Definisi operasional merupakan “variabel peneliti yang dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum melakukan analisis serta mengetahui sumber pengukuran.”

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana mengukur variabel. Dalam penelitian yang menjadi definisi operasional antara lain sebagai berikut.

**Tabel 1**  
**Definisi Operasional**

Konsep	Indikator
Implementasi George Edward III (Dalam Widodo 2010:6)	Komunikasi
	Sumber Daya
	Diposisi
	Struktur Birokrasi
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 ( Pasal 27C)	c. melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran

#### **Informan Penelitian**

Informan Penelitian adalah sumber yang dijadikan informan dalam dilakukan yaitu tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024

No	Informan	Jumlah
1	kabid kurikulum kepala dinas provinsi sumatera selatan	1
2	Kepala Sekolah Smk Utama Bakti	1
3	Waka Kurikulum Smk Utama Bakti	1
4	Guru Bidang Studi Smk Utama Bakti	1
	Jumlah	4 orang

#### **Hasil Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji pelaksanaan refleksi, evaluasi, dan perbaikan implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27C “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024.” Studi ini berfokus pada bagaimana proses-proses tersebut diimplementasikan di SMK Utama Bakti Palembang dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian ini dilakukan pada bulan April tahun 2025, untuk membahas masing-masing indikator dari Implementasi “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum

Pada Pendidikan Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar Dan Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan” Pada Dinas Pendidikan kota Palembang( Studi Kasus 27C Di SMK Utama Bakti Palembang). Dilakukan beberapa informan yang ada di Dinas pendidikan Sumatera Selatan dan di SMK Utama Bakti Palembang.

Adapun Informan Penelitian dalam wawancara peneliti berjumlah 4 orang

1. Bapak Andi Bobby Wahyudi, S.H., M.Si
2. Bapak Harsono, S.Pd
3. Bapak Drs. Khozen
4. Ibu Septi Firdayanti, M.Pd

### **Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar Dan Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan Pada Dinas Pendidikan kota Palembang (Studi Kasus Pasal 27C diSMK Utama Bakti Palembang).**

Pada bagian ini penulis akan menguraikan Implementasi “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar Dan Jenjang Pendidikan Menengah Atas” Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Pasal 27C Di SMK Utama Bakti Palembang). Pengertian Implementasi secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi adalah “pelaksanaan tindak oleh individu, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.”

#### **A. Implementasi**

Dalam pandangan Edward III dalam Agustino (2016:142) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat kendala yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi (sikap), dan Struktur Birokrasi.

##### **1. Komunikasi**

Komunikasi sangat penting dalam suatu perusahaan, organisasi dan instansi sebagainya. Dalam menentukan tujuan keberhasilan komunikasi sangat penting dalam implementasi. Komunikasi sebagai alat untuk berjalani jaringan kerja dalam membangun kepercayaan antar individu ke kelompok dalam mencapai tujuan atau sasaran agar tujuan ingin dicapai dengan baik Dalam komunikasi menjadi di Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus SMK Utama Bakti Palembang) dalam menjalin hubungan antar pegawai baik pimpinan sampai ke bawahan menjaga erat komunikasi dalam hal apapun.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat berkesimpulan bahwa antara beberapa pihak yang terlibat dalam program ini komunikasi sudah menjadi unsur utama dalam keberhasilan program Implementasi “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar Dan Jenjang Pendidikan Menengah Kejuaran” Pada Dinas Pendidikan kota Palembang (Studi Kasus Pasal 27C Di SMK Utama Bakti Palembang) ini, sebagai mana disampaikan dengan kerja sama yang disampaikan dengan kerja sama antara Sosialisasi pada dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Kepala Sekolah SMK Utama Bakti Palembang, Waka Kurikulum Merdeka dan Guru Studi Kurikulum Merdeka telah berjalan dengan baik lihat dari sosialisasi yang masih baik. Hal ini tidak sesuai dengan teori dari

Edward III (2014) Mengemukakan bahwa “komunikasi dilihat dari segi sosialisasi dalam suatu pelaksanaan atau implementasi kebijakan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi kebijakan publik.”

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya sangat penting dalam implementasi kebijakan karena membantu dalam mengikuti aturan dan mencapai tujuan. Sumber daya memainkan peran besar dalam seberapa baik lembaga dapat melaksanakan kebijakan. Kesuksesan dalam menerapkan aturan pemerintah bergantung pada seberapa baik sumber daya digunakan, terutama sumber daya manusia. Memiliki cukup orang dengan wewenang dan alat yang tepat untuk melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab mereka di bidang masing-masing sangatlah penting. Sumber daya manusia yang ada di Pada Dinas Pendidikan kota Palembang (Studi Kasus SMK Utama Bakti Palembang).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam implementasi “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar Dan Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan” Pada Dinas Pendidikan kota Palembang (Studi Kasus Pasal 27C Di SMK Utama Bakti Palembang) Sudah baik terlihat pada proses belajar di SMK Utama Bakti Palembang.

## **3. Diposisi**

Diposisi merupakan sikap dari pelaksanaan kebijakan yang merupakan kendala penting ketiga pendekatan mengenai pelaksanaan kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya

Dari penjelasan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa Terkait Diposisi di Smk Utama Bakti Palembang Selatan Diposisi atau sikap tenaga kerja guru sesuai aturan yang diterapkan dan sikap yang baik dan sesuai prosedur dalam melaksanakan peraturan yang diterapkan dan menjadi acuan utama dalam attitude atau berakhlak hati suci dan belum sepenuhnya 100% dalam kedisiplinan dimana terdapat 15% belum begitu aktif disiplin dikarenakan suatu hal dalam pengawasan dan perlu dievaluasi.

## **4. Struktur Birokrasi**

Cara suatu organisasi diorganisasikan memengaruhi seberapa baik kebijakan-kebijakan diterapkan. Salah satu bagian penting dari setiap organisasi adalah memiliki prosedur operasional standar (

SOP). SOP ini membantu semua orang memahami cara melakukan tugas mereka dengan benar. Jika organisasi terlalu besar dan memiliki terlalu banyak tingkatan, hal ini dapat mempersulit pengelolaan. Hal ini menciptakan banyak aturan dan dokumen administratif, yang membuat organisasi sulit untuk fleksibel dan bekerja secara efisien.

Analisa yang di dapatkan bahwa setiap Implementasi “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar Dan Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan” Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mengenai struktur birokrasi adalah watak karakter dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, demokratis dan sabar jika memiliki disposisi yang baik menjadi acuan dalam kedisiplinan guru dalam proses mengajar di sekolah SMK Utama Bakti yang memperhatikan sikap dan perilaku yang harus di utamakan.

Berdasarkan uraian diatas yang telah ditetapkan sudah sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing hanya saja petugas perlu disiplin dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya masing-masing.

## **Kurikulum Pada Pendidikan Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar Dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Sumatera Selatan (Studi Kasus Pasal 27C Di SMK Utama Bakti Palembang)**

Berdasarkan wawancara dan observasi, proses refleksi di SMK Utama Bakti dilakukan melalui rapat koordinasi guru dan evaluasi pembelajaran setiap akhir semester. Evaluasi dilakukan dengan mengukur ketercapaian kompetensi dasar dan umpan balik siswa. Sedangkan perbaikan dilakukan dengan merevisi KOSP, menyesuaikan RPP dengan hasil evaluasi, serta mengadakan pelatihan untuk penguatan metode pembelajaran aktif. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 27C yang menekankan pentingnya peningkatan mutu melalui perbaikan berkelanjutan di tingkat satuan pendidikan.

1. melakukan refleksi terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka,
2. melakukan evaluasi terhadap pencapaian pembelajaran, dan
3. menyusun perbaikan strategi pelaksanaan kurikulum untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar.

Hal ini dijelaskan juga dalam “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan,” dengan Seiring bertambahnya usia para siswa, banyak anak-anak mulai memahami nilai pendidikan. Mereka secara aktif berusaha mengembangkan diri mereka dengan cara yang membantu mereka menjadi orang-orang yang setia dan berkomitmen kepada Allah Yang Maha Kuasa, memiliki akhlak yang baik, sehat secara fisik, banyak belajar, memperoleh keterampilan yang berguna, berpikir kreatif, mampu merawat diri sendiri, dan menjadi anggota masyarakat yang adil dan bertanggung jawab.

Adapun peran-peran pemangku kepentingan yaitu: Peran Kabid Kurikulum dalam Kurikulum Merdeka, Peran Kepala Sekolah SMK Utama Bakti dalam Kurikulum merdeka, Peran Waka Kurikulum SMK Utama Bakti dalam Kurikulum Merdeka, Peran Guru SMK Utama Bakti dalam Kurikulum Merdeka.

### **a. Peran Kabid Kurikulum dalam Kurikulum Merdeka**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Kurikulum pada tanggal 17 Mei 2025 mengenai Kurikulum Merdeka diperoleh keterangan bahwa:

“Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Saya percaya bahwa Kurikulum Merdeka dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara lebih fleksibel dan sesuai dengan minat mereka.”

### **b. Peran Kepala Sekolah SMK Utama Bakti dalam Kurikulum merdeka.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Utama Bakti Pada tanggal 17 Mei 2025 Mengenai Kurikulum Merdeka mengatakan bahwa :

“Kurikulum Merdeka dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara lebih mandiri dan kreatif. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan kemampuan dan kompetensi yang lebih baik.”

### c. Peran Waka Kurikulum SMK Utama Bakti dalam Kurikulum Merdeka

Wawancara dengan Waka Kurikulum SMK Utama Bakti pada 17 Mei 2025 Mengenai Kurikulum Merdeka menjelaskan bahwa :

“Tantangan yang dihadapi dalam implementasi Kurikulum Merdeka adalah memastikan bahwa sekolah dan guru memiliki kemampuan dan kompetensi yang cukup untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, perlu juga dilakukan pelatihan dan pengembangan bagi guru-guru untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka”

### d. Peran Guru Bidang Studi Kurikulum SMK Utama Bakti Dalam Kurikulum Merdeka

“Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Saya percaya bahwa Kurikulum Merdeka dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara lebih fleksibel dan sesuai dengan minat mereka.”

## **REFLEKSI, EVALUASI, DAN PERBAIKAN KURIKULUM SESUAI PASAL 27C**

### 1. Refleksi Implementasi Kurikulum Merdeka di SMK Utama Bakti Palembang

Refleksi dilakukan oleh kepala sekolah, waka kurikulum, dan guru terhadap penerapan Kurikulum Merdeka. Dalam wawancara, terlihat bahwa guru dan pimpinan sekolah menyadari pentingnya pembelajaran yang fleksibel, mandiri, dan berbasis pada minat siswa. Namun, mereka juga mengakui bahwa sebagian guru masih terbiasa menggunakan metode ceramah dan belum sepenuhnya mengintegrasikan pendekatan project-based learning.

### 2. Evaluasi Hasil Implementasi Kurikulum Merdeka

Evaluasi dilakukan terhadap berbagai aspek, antara lain:

- a. Komunikasi: sudah cukup baik, namun sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas.
- b. Sumber daya: guru sudah dilatih, namun belum merata; ada keterbatasan perangkat ajar.
- c. Disposisi (sikap pelaksana): sebagian besar guru dan kepala sekolah mendukung perubahan, tetapi masih perlu peningkatan disiplin dan konsistensi.
- d. Struktur birokrasi: struktur organisasi sekolah mendukung implementasi, tetapi alur koordinasi masih perlu ditingkatkan.

### 3. Perbaikan yang Dilakukan dan Direncanakan

Sebagai tindak lanjut dari refleksi dan evaluasi:

Kepala sekolah dan waka kurikulum menyusun program pelatihan lanjutan bagi guru. Pengadaan bahan ajar dan buku untuk mendukung pembelajaran kontekstual. Peningkatan koordinasi antara kepala sekolah, guru, dan pihak luar seperti industri. Penguatan evaluasi dan supervisi rutin oleh pimpinan sekolah.

Upaya perbaikan ini menunjukkan komitmen sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik..

## Pembahasan

Hasil penelitian dapat dilihat kembali pada teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Implementasi George C. Edward III yang selanjutnya digunakan sebagai indikator untuk mengukur Implementasi “Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar Dan Jenjang Pendidikan Menengah” Pada Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 27C Di SMK Utama Bakti Palembang)

### A. Implementasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis akan membahas Implementasi “Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Usia, Dini Jenjang Pendidikan Dasar Dan Jenjang Pendidikan Menengah Kejuruan” (Studi Kasus Pasal 27C Di SMK Utama Bakti Palembang). Implementasi Merupakan Tahap dari kebijakan publik sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (Critical Satage). Disebut penting karna tahapan ini merupakan “jembatan” anantara dunia konsep dengan dunia realita. Purwanto,(2012:65) Implementasi menurut teori Lester dan Estewart dalam kusumanegara,(2010:97) Implementasi adalah “sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik.” Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administrative.Keberhasilan Implementasi Menurut Edward III dalam Indiahono, (2009:31-33) dipengaruhi oleh kebijakan yang dibagi menjadi empat indikator.

#### 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari komunikasi yang ada. Kebijakan harus disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga informasi yang disampaikan akurat. Prospek-prospek tentang implementasi yang efektif di tentukan oleh kejelasan dan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan oleh ketepatan, konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Semakin baik koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelitian maka pembahasan untuk indikator komunikasi di Dinas Pendidikan kota Palembang sudah baik, bisa dilihat dari sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memenuhi persyaratan dan apa pentingnya melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mereka melakukan koordinasi dengan dengan pihak terkait sosialisasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan kota Palembang kepada masyarakat hal ini dilakukan agar masyarakat bisa memahami apa manfaat pendidikan, Namun usaha yang dilakukan Dinas pendidikan kota Palembang untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat ternyata belum sepenuhnya berhasil hal ini ditunjukan masih ada masyarakat yang belum mengetahui manfaat pendidikan itu sendiri.

Menurut analisis penulis bahwa apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors), yang bertanggung jawab atas pencapaian standar kebijakan, karena standar dan tujuan itu harus dikomunikasikan dengan baik kepada staf demi tercapainya tujuan. Komunikasi yang disampaikan dengan baik akan sangat berdampak pada pelaksanaan pelayanan administrasi kedepannya.

#### 2. Sumber Daya

Sumber Daya merupakan salah satu kendala yang sangat penting dalam organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, karena manusia yang merencanakan sampai mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam organisasi. Sumber daya tersebut harus cukup jumlahnya sesuai kebutuhan, serta memiliki keterampilan yang memadai sesuai tuntutan tugas-tugas dalam organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian maka pembahasan untk indikator sumber daya di Dinas Pendidikan kota Palembang sudah terlaksana dengan baik, bisa dilihat dari sumber daya manusia di Dinas Pendidikan kota Palembang sudah mempersiapkan orang-orang yang berkompeten pada

bidangnya masing-masing, sumber daya financial yang anggarannya sudah cukup dialokasikan untuk kebutuhan serta sumber daya sarana sudah cukup memadai.

Menurut analisis penulis keberhasilan implementasi sangat tergantung pada sumber daya manusia yang tersedia, karena setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan kompeten bidangnya masing-masing, selain sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana juga sangat penting selain untuk kemudahan dalam melaksanakan proses pembelajaran pada kurikulum merdeka.

### 3. Disposisi

Disposisi adalah sikap atau karakteristik yang dimiliki implementor, disposisi juga menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, Disposisi memegang peran penting dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya, seseorang harus paham dan memiliki pandangan yang baik terkait dengan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian maka pembahasan indikator disposisi atau sikap pelaksana Dinas Pendidikan kota Palembang sudah sangat baik, dalam kegiatan mereka sudah mengacu pada tugas yang telah ditetapkan, hal ini dilihat dari respon para petugas kepada masyarakat dalam proses sosialisasi mengarahkan dan memberikan solusi kepada.

Menurut analisis penulis sikap penerimaan atau penolakan dari staf sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena sikap yang dilaksanakan kepada masyarakat akan mudah dipahami baik itu permasalahan atau persoalan yang mereka rasakan.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah suatu organisasi yang didasarkan pada hierarki yang jelas, tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas, serta aturan dan prosedur yang formal. Struktur ini digunakan untuk mengatur dan mengelola suatu organisasi atau entitas, baik itu instansi pemerintah, perusahaan, maupun organisasi non-pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian maka pembahasan untuk struktur birokrasi di Dinas Pendidikan kota Palembang sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat di Dinas Pendidikan Sumatera Selatan.

## **B. REFLEKSI, EVALUASI, DAN PERBAIKAN KURIKULUM SESUAI PASAL 27C**

### 1. Refleksi terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka

Refleksi merupakan langkah awal yang penting dalam memahami bagaimana pelaksanaan Kurikulum Merdeka berjalan di SMK Utama Bakti Palembang. Refleksi ini dilakukan oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru, dengan mencermati sejauh mana prinsip Kurikulum Merdeka diterapkan secara nyata di kelas.

Hasil refleksi menunjukkan bahwa meskipun secara umum terdapat semangat dan niat baik dalam menerapkan Kurikulum Merdeka, terdapat kesenjangan antara idealitas kurikulum dengan praktik lapangan. Sebagian guru masih mempertahankan metode pembelajaran lama yang berpusat pada guru, belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi maupun berbasis proyek. Hal ini menunjukkan bahwa proses internalisasi filosofi kurikulum belum tuntas. Selain itu, refleksi juga mengungkapkan bahwa keterlibatan siswa dalam merancang proses belajarnya masih minim, dan guru membutuhkan pendampingan untuk memahami peran mereka dalam konteks kurikulum baru.

### 2. Evaluasi terhadap Proses dan Dampak Implementasi

- a. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur organisasi sebagai alat ukur.

- b. Komunikasi internal antar pihak sekolah sudah berjalan, namun belum sepenuhnya menyentuh seluruh elemen ekosistem pendidikan seperti orang tua dan masyarakat sekitar. Sosialisasi program dan pendekatan Kurikulum Merdeka masih terbatas.
- c. Sumber daya manusia (guru) yang telah mengikuti pelatihan masih memerlukan penguatan kompetensi pedagogik dan teknis. Fasilitas dan bahan ajar juga belum memadai untuk mendukung pembelajaran yang kreatif dan kontekstual.
- d. Disposisi pelaksana, yaitu sikap dan kesiapan guru serta kepala sekolah, cukup positif, namun sebagian masih merasa terbebani dengan perubahan, sehingga belum sepenuhnya mampu menjalankan kurikulum secara optimal.
- e. Struktur organisasi sekolah sudah mengakomodasi Kurikulum Merdeka dengan membentuk tim implementasi dan menyusun program kerja tahunan, namun pelaksanaan supervisi dan evaluasi masih bersifat formalitas dan belum berdampak langsung pada kualitas pembelajaran.

Evaluasi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum bukan hanya ditentukan oleh kesiapan administratif, tetapi juga oleh kesadaran pedagogis dan budaya kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan di sekolah.

### 3. Perbaikan Implementasi Kurikulum untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi, dilakukan berbagai langkah perbaikan oleh pihak sekolah. Perbaikan ini mencerminkan upaya sistematis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Di antaranya:

- a. Melaksanakan pelatihan lanjutan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan guru.
- b. Menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lokalitas.
- c. Mendorong kolaborasi antar guru untuk merancang modul ajar yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan nyata.
- d. Melakukan supervisi yang tidak hanya administratif, tetapi juga bersifat mendampingi dan reflektif.

Langkah-langkah perbaikan ini sejalan dengan prinsip Kurikulum Merdeka yang memberikan otonomi pada satuan pendidikan untuk terus berinovasi dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Hal ini juga mencerminkan implementasi nyata dari Pasal 27C Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, bahwa setiap satuan pendidikan wajib melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan atas pelaksanaan kurikulumnya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar Dan Jenjang Pendidikan Menengah Atas” Pada Dinas Pendidikan kota Palembang (Studi Kasus Pasal 27C Di SMK Utama Bakti Palembang) mengenai kewajiban satuan pendidikan untuk melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan implementasi kurikulum, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Refleksi yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan menunjukkan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SMK Utama Bakti Palembang masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal perubahan paradigma pembelajaran dan kesiapan guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis proyek.
2. Evaluasi terhadap implementasi kurikulum mengungkapkan bahwa secara struktural sekolah telah berusaha menyesuaikan diri, tetapi masih terdapat kekurangan dalam hal komunikasi eksternal, pemerataan pelatihan guru, serta supervisi yang lebih mendalam terhadap proses pembelajaran.

3. Perbaikan telah mulai dilaksanakan oleh sekolah melalui program pelatihan lanjutan, peningkatan kolaborasi guru, pengadaan media pembelajaran yang kontekstual, serta penguatan evaluasi dan supervisi. Upaya ini menjadi bentuk
4. komitmen sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

### **Saran**

Berdasarkan Simpulan Peneliti memberikan saran agar memperkuat dari segi peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum merdeka di SMK Utama Bakti Palembang. Supaya untuk kedepannya bisa lebih baik dari sebelumnya.

1. Bagi Satuan Pendidikan, disarankan untuk terus melakukan refleksi secara berkala guna mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan kurikulum, serta melibatkan seluruh warga sekolah dalam proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
2. Bagi Guru, penting untuk aktif mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional agar mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka secara optimal, terutama dalam menyusun modul ajar yang adaptif dan relevan.
3. Bagi Dinas Pendidikan, perlu adanya dukungan sistemik berupa kebijakan afirmatif, pendampingan rutin, serta distribusi sumber daya yang merata agar semua sekolah, khususnya SMK swasta, dapat menjalankan Kurikulum Merdeka secara efektif.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan studi lebih lanjut mengenai efektivitas strategi perbaikan implementasi kurikulum di tingkat sekolah, serta dampaknya terhadap hasil belajar peserta didik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, R. (2021). *Tantangan Implementasi Kebijakan Kurikulum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pendidikan.
- Anderson, J. (2021). *Educational Policy Implementation: Context and Challenges*. New York: Pearson Education.
- Ida Bagus, I., dkk. (2021). *Peran Guru dalam Pengembangan dan Implementasi Kurikulum di Sekolah*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Kemendikbud Ristek. (2022). *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Maruba Purba (2020) *Tesis: Implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak (studi di sma negeri 1 kabanjahe) Medan*
- Nurhadi, M. (2022). *Teknologi Digital dalam Pembelajaran: Peran dan Tantangan di Era Digital*. Bandung: Alfabeta.
- Rahmawati, D. (2022). *Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam Pendidikan Indonesia*. Surabaya: Graha Ilmu.
- Rosmana, T., dkk. (2021). *Studi tentang Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah-sekolah Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ilmiah.
- Suhendra, B. (2023). *Resistensi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan: Studi Kasus di Sekolah-sekolah Indonesia*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Sunarni, W., & Karyono, S. (2021). *Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka di Berbagai Satuan Pendidikan*. Semarang: Unnes Press.
- Syntia Eka Putri Setioyuliani ( 2023 ) *Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*. ISSN: 2808-9502. Medan : Recourse Center.